

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Penerapan praktik tatakelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu langkah penting bagi perusahaan untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan, mendorong pengelolaan perusahaan, serta kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan penahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan <sup>[1]</sup>. Di era informasi saat ini, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu hal yang dapat mendukung penerapan GCG untuk menunjang proses bisnis perusahaan dan menjadi basis layanan yang berkualitas dalam optimalisasi bisnisnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/2013, setiap perusahaan, termasuk BUMN, harus memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) dapat berjalan dalam aspek bisnis dan pengelolaan perusahaan pada semua jajaran perusahaan. Adanya keterbatasan sumber daya (seperti data, sistem aplikasi, teknologi, fasilitas dan sumber daya manusia), serta adanya kebutuhan informasi yang berkualitas merupakan faktor utama mengapa pemanfaatan teknologi informasi perlu direncanakan secara sistematis. Karena itu diperlukan adanya panduan atau tata pamong yang mengatur bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi. Panduan ini selanjutnya dikenal dengan istilah *Information Technology Governance* (*IT Governance*) <sup>[2]</sup>. Peranan *IT Governance* tidaklah diragukan lagi dalam pencapaian tujuan suatu organisasi yang mengadopsi TI <sup>[3]</sup>. *IT Governance* atau tata kelola TI merupakan salah satu pilar utama dari GCG, maka dalam

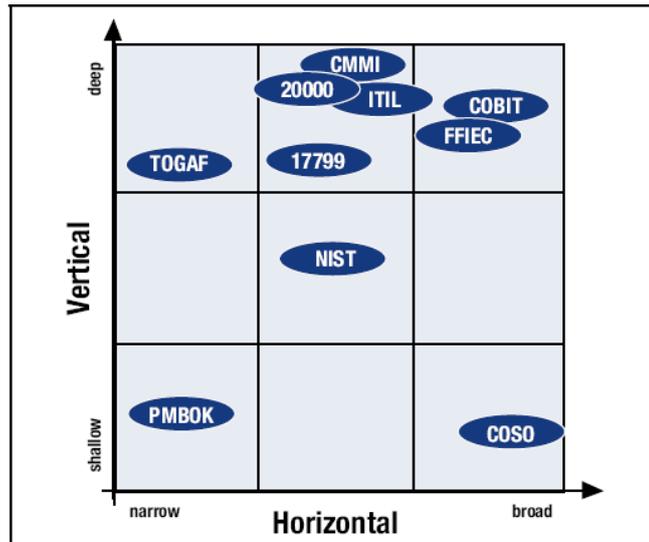
pelaksanaan *IT Governance* yang baik sangat diperlukan standar tata kelola TI dengan mengacu kepada standar tata kelola TI internasional yang telah diterima secara luas dan teruji implementasinya. Standar tersebut akan memberikan *framework* bagi tata kelola yang efektif, efisien, dan optimal serta dapat diterapkan dalam perusahaan di lingkungan BUMN.

Perusahaan XYZ merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) satu-satunya yang dipercaya oleh Negara untuk mencetak uang rupiah (baik uang kertas maupun uang logam) bagi Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006. Tugas Utama Perusahaan XYZ adalah menyelenggarakan usaha mencetak uang rupiah Republik Indonesia (baik uang kertas maupun uang logam) untuk Bank Indonesia serta mencetak produk kertas berharga non-uang sesuai pesanan perusahaan pemesan. Selain mencetak uang rupiah Republik Indonesia, juga mencetak produk sekuriti lainnya, termasuk cetakan kertas berharga non-uang dan logam non-uang. Penyajian informasi yang cepat, tepat dan akurat merupakan suatu kebutuhan di era keterbukaan informasi. TI mempunyai peran penting dalam mendukung kelancaran proses bisnis di Perusahaan XYZ <sup>[4]</sup>.

Perusahaan XYZ memiliki visi yaitu menjadi perusahaan berkelas dunia dibidang '*Integrated Security Printing and System*', sehingga peran TI bagi perusahaan sangatlah penting. Pada Perusahaan XYZ terdapat departemen TI yang memiliki peran dalam pengelolaan infrastruktur teknologi, pengembangan sistem berbasis jaringan, serta pemeliharaan keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam sistem. Berdasarkan hasil observasi awal, diperoleh informasi bahwa Perusahaan XYZ sudah menerapkan sistem informasi manajemen untuk mendukung kegiatan bisnis perusahaan seperti implementasi ERP, *Budget Planning*, EAM (*Enterprise Asset Management*), *e-Procurement*, HCMS (*Human Capital Management System*) dan sistem informasi lainnya. Namun pada penerapannya masih dinilai belum efisien. Hal itu menunjukkan bahwa kurangnya evaluasi terhadap tata kelola TI. Selain itu, berdasarkan sasaran yang terdapat pada Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/2013 target *maturity level* dari Tata Kelola TI BUMN dalam 5 tahun kedepan adalah minimal *maturity level* 3 sesuai dengan *maturity level* yang

ditetapkan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dengan melakukan penilaian tata kelola TI yang memang belum dilaksanakan di Perusahaan XYZ untuk mengetahui kondisi TI saat ini dan pemahaman mengenai kemampuan untuk mencapai tujuan bisnis 5 tahun kedepan, termasuk proses bisnis, arsitektur TI (infrastruktur dan aplikasi), organisasi dan portofolio rencana proyek TI. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada salah satu *framework* tata kelola yang memiliki ruang lingkup yang cukup luas yaitu COBIT.

COBIT adalah sekumpulan dokumentasi *best practices* untuk *IT Governance* yang dapat membantu auditor, pengguna (*user*), dan manajemen, untuk menjembatani *gap* antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol dan masalah-masalah teknis TI <sup>[5]</sup>. COBIT Versi 5 merupakan versi terbaru dari versi sebelumnya yaitu COBIT Versi 4.1, dimana pada COBIT Versi 4.1 belum terbagi ke dalam dua area utama yaitu tata kelola (*governance*) dan manajemen (*management*). Selain itu, COBIT Versi 4.1 terdiri dari empat domain dan 34 proses, sedangkan pada COBIT Versi 5 ada penambahan menjadi lima domain yaitu *Evaluate, Direct & Monitor; Align, Planning and Organisation; Build, Acquire & Implement; Deliver, Service & Support* dan *Monitor, Evaluate & Assess*, serta terdiri dari 37 proses. Seperti terlihat pada Gambar I.1, dibandingkan dengan *framework* lain, COBIT memiliki *range* spektrum proses TI yang lebih luas dan lebih mendetail, dimana *framework* lain hanya melakukan sebagian dari proses tatakelola yang dilakukan oleh COBIT.



Gambar I.1 Pemetaan COBIT<sup>[6]</sup>

COBIT mempunyai kompromi antara dimensi horizontal dan vertikal yang lebih baik dari *framework* lainnya. Seperti salah satu *framework* lain yaitu ITIL yang merupakan *best practice* yang paling mendetail dan mendalam dalam mendefinisikan proses-proses TI yang bersifat teknis dan operasional. Sedangkan COSO mempunyai detail yang dangkal, walaupun spektrum proses teknis dan operasionalnya cukup luas.<sup>[7]</sup> Pada Tabel I.1 menunjukkan bahwa *framework* lain selain COBIT tidak memiliki *range* spektrum yang seluas COBIT. *Framework* lainnya hanya melakukan sebagian dari proses-proses pengelolaan yang ada di dalam COBIT.

Tabel I.1 *High-level Mapping of Guidance to COBIT Domains*<sup>[6]</sup>

	PO	AI	DS	ME
COSO	+	+	0	0
ITIL	0	0	+	-
ISO/IEC 17799	0	+	+	0
ISO/IEC 20000	0	-	+	-
FFIEC	+	0	0	+
PMBOK	0	-	-	-
CMMI	-	+	-	0
TOGAF 8.1	0	-	-	-
NIST 800-53	0	-	0	-
(+) Frequently addressed (o) Moderately addressed (-) Not or rarely addressed				

COBIT mempunyai *Process Assessment Model* (PAM) yang dikembangkan untuk melakukan *process assessment* terhadap proses-proses pada domain COBIT dalam rangka menentukan tingkat efektifitas dan efisiensi dari sekumpulan proses, dengan cara mengevaluasi tingkat kapabilitasnya (atau kematangannya). Secara garis besar, model pada COBIT PAM berfungsi layaknya acuan dasar (*base reference*) terhadap evaluasi kinerja dan kapabilitas suatu kumpulan proses TI dalam organisasi.

Menurut Baker (2012) yang berdasarkan pada *Global Status Report on the Governance of Enterprise IT* (GEIT) 2011, dari ISACA's *affiliated IT Governance Institute*, memprediksikan ketika melihat *business outcomes of GEIT*, 42% mengatakan COBIT Versi 5 memperbaiki manajemen TI terkait risiko, 40% mengatakan meningkatnya komunikasi dan hubungan antara bisnis dan TI, 38% mengatakan menurunkan biaya TI, 37% mengatakan meningkatnya *delivery* TI dari tujuan bisnis dan 28% mengatakan meningkatnya daya saing bisnis. Hal tersebut menunjukkan manfaat yang dirasakan perusahaan setelah menggunakan *framework* COBIT. Oleh karena itu, penggunaan COBIT Versi 5 dalam penilaian tata kelola TI pada penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi penerapan tata kelola TI pada Perusahaan XYZ dan memberikan manfaat yang serupa bagi penerapan tata kelola TI di perusahaan.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat kapabilitas (*capability level*) proses TI eksisting Perusahaan XYZ berdasarkan COBIT Versi 5?
2. Bagaimana rekomendasi perbaikan dari hasil penilaian untuk meningkatkan kapabilitas proses TI di Perusahaan XYZ?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kapabilitas proses TI eksisting di Perusahaan XYZ berdasarkan COBIT Versi 5.

2. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kapabilitas proses TI di Perusahaan XYZ?

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi manajemen Perusahaan XYZ.
2. Mengetahui status posisi perusahaan dalam penerapan *IT Governance* pada saat ini dibandingkan dengan status posisi industri/perusahaan sekelas.

#### **I.5 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini fokus pada tujuan yang telah ditetapkan, maka ditetapkan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Data perusahaan yang digunakan pada penelitian ini adalah data perusahaan tahun 2012.
2. Penelitian tidak dilakukan sampai tahap implementasi perbaikan di Perusahaan XYZ, sehingga hanya berupa usulan perbaikan untuk peningkatan dan penerapan *IT Governance* dan manajemen perusahaan.
3. Penelitian dibatasi hanya pada proses-proses prioritas atas kesepakatan dengan Perusahaan XYZ.